

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROSTITUSI DI  
WILAYAH TANGERANG DITINJAU DARI  
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2005  
TENTANG PELARANGAN PROSTITUSI**

**PROPOSAL SKRIPSI**

**Oleh :**  
**IQBAL NUSANTARA AL-GONI**  
**201710115222**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
TAHUN 2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi

: Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Di Wilayah  
Tangerang Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 8  
Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran.

Nama Mahasiswa

: Iqbal Nusantara Al Goni

Nomor Pokok Mahasiswa

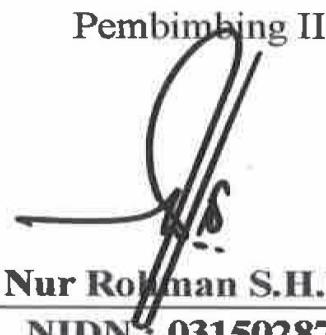
: 201710115222

Program Studi/Fakultas

: Ilmu Hukum/Hukum



Pembimbing II



Adi Nur Rohman S.H.I., M.Ag.  
NIDN : 0315028702

## LEMBARAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Di Wilayah Tangerang Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran.

Nama Mahasiswa : Iqbal Nusantara Al Goni

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115222

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2022

Bekasi, 22 Januari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Pengaji : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.S1.  
NIDN. 0303116302

Pengaji 1 : Fransiska Novita Elenora, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0313047703

Pengaji 2 : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.  
NIDN. 0319077606

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.  
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.  
NIDN. 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Iqbal Nusantara Al-Goni  
NPM : 201710115222  
TTL : Tangerang, 26 September 1999  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Di Wilayah Kota Tangerang Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Raya sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Jakarta, 19 Juni 2021  
Yang Membuat Pernyataan



Iqbal Nusantara Al-Goni



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iqbal Nusantara Al Goni  
NPM : 201710115222  
TTL : Tangerang, 26 September 1999  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul  
**:PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROSTITUSI DI WILAYAH KOTA TANGERANG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas Royaltynon-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 10 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Iqbal Nusantara Al Goni

## ABSTRAK

**Iqbal Nusantara Al Goni, 201710115222, Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Dalam Meminimalisir Prostitusi Di Wilayah Tangerang, 2021**

Pengaturan mengenai prostitusi ini juga termuat dalam peraturan yang dibuat oleh Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Prostitusi yang berlaku di wilayah Kota Tangerang. Ketentuan yang terkait dengan prostitusi antara lain disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2)Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Prostitusi menyatakan, bahwa “siapapun di Daerah dilarang baik secara sendiri ataupun bersamasama untuk melakukan perbuatan pelacuran. Rumusan masalah dalam skripsi ini mengenai alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana prostitusi di wilayah Kota Tangerang dan pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pelacuran khususnya di wilayah Kota Tangerang. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) didukung wawancara untuk mendapatkan kesimpulan bahwa alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana prostitusi di wilayah Kota Tangerang, yaitu alasan yang paling dominan karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, alasan lainnya faktor putus cinta, dampak lingkungan dan yang terakhir tinggi hasrat seks yang menjadi konsumen prostitusi. Alasan lainnya berdasarkan narasumber yang menjelaskan dikarenakan tertipu oleh rayuan atau janji manis mucikari yang katanya hendak mencari kerja yang pantas dan gajinya besar juga sehingga tertarik untuk melakukan prostitusi.Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pelacuran khususnya di wilayah Kota Tangerang merupakan salah satu tugas dan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat efektif. Faktanya, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Wilayah Kota Tangerang seperti kurangnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan tidak jeranya pelaku prostitusi dikarenakan harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga hal ini berdampak tidak efektifnya penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Wilayah kota Tangerang.

## ***ABSTRACT***

***Iqbal Nusantara Al Goni, 201710115222, The Effectiveness of Regional Regulation Number 8 of 2005 concerning Prohibition of Prostitution in Minimizing Prostitution in the Tangerang Region, 2021***

*This regulation regarding prostitution is also contained in the regulation made by Perda No. 8 of 2005 concerning the Prohibition of Prostitution which applies in the Tangerang City area. Provisions related to prostitution, among others, are stated in Article 2 paragraph (2) of Regional Regulation Number 8 of 2005 concerning the Prohibition of Prostitution, which states that "anyone in the region is prohibited either individually or collectively from committing prostitution. The formulation of the problem in this thesis concerns the reasons behind the occurrence of criminal acts of prostitution in the Tangerang City area and the implementation of Regional Regulation Number 8 of 2005 concerning the Prohibition of Prostitution can minimize the occurrence of prostitution, especially in the Tangerang City area. This thesis uses a normative legal research method (literature) supported by interviews to get the conclusion that the reasons behind the occurrence of criminal acts of prostitution in the Tangerang City area are the most dominant reasons due to economic factors to meet the needs of daily life, other reasons are dropping factors. love, environmental impact and the last high sexual desire which becomes a consumer of prostitution. Another reason is based on the source who explained that he was deceived by the seduction or sweet promise of a pimp who said he wanted to find a decent job and a large salary so that he was attracted to prostitution. The implementation of Perda No. 8/2005 concerning the Prohibition of Prostitution to minimize the occurrence of criminal acts of prostitution, especially in the Tangerang City area, is one of the duties and authorities of the Civil Service Police Unit in order to be effective. In fact, there are several problems in the implementation of Perda No.8 of 2005 concerning Prohibition of Prostitution in the Tangerang City Area, such as the lack of personnel from the Civil Service Police Unit and the absence of prostitutes because they have to meet the needs of their families, so this has an ineffective implementation of Regional Regulation No. 8. 2005 concerning the Prohibition of Prostitution in the Tangerang city area.*

*Keywords: Effectiveness, Regional Regulations, Prostitution,*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum,*

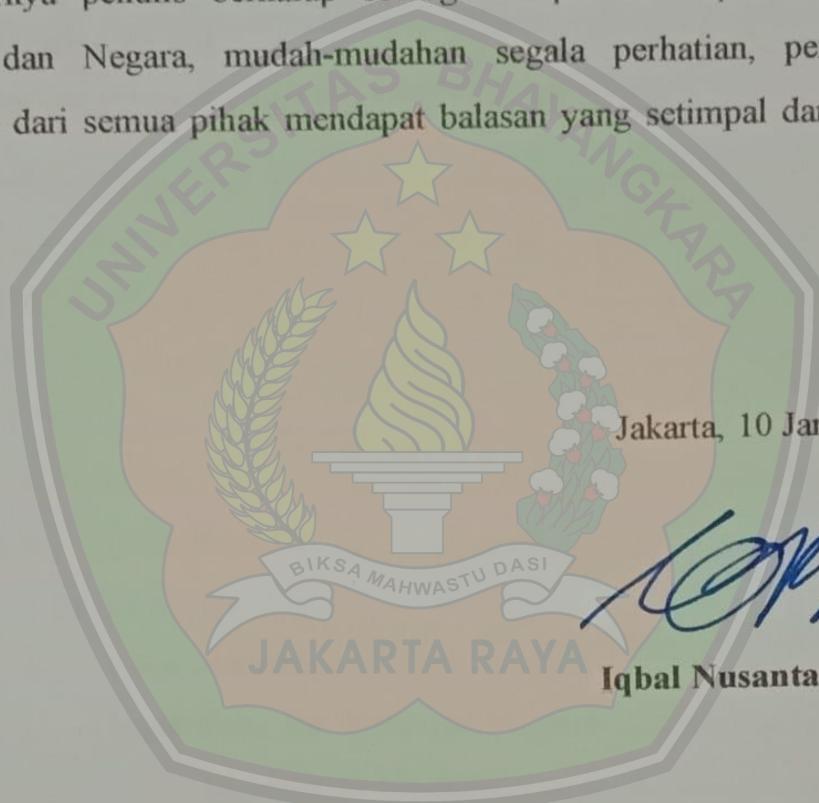
Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DALAM MEMINIMALISIR PROSTITUSI DI WILAYAH TANGERANG.** Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Ahmad Baihaki, SHI., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan hukum ini.
4. Bapak Adi Nur Rohman, SHI., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan hukum ini.
5. Bapak dan Ibuku tercinta A.Goni,S.H.,M.H dan Sri Listiawati dan adik-adiku Ilham dan Ikhwan ,yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, cinta serta kasih sayang kepada penulis, dan selalu memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini..
6. Kepada Sahabat-sahabat Agam, Herdi, Rizal, Ega, Yoga dan Imam yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

7. Pimpinan dan rekan-rekan penulis di keluarga besar LAW OFFICE A.Goni,S.H.,M.H & PARTENERS yang selalu memberikan waktu luang, motivasi dan dukungan bagi penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN .....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR SINGKATAN .....	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	5
1.4.Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran .....	6
1.5.1. Kerangka Teori .....	6
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	9
1.5.3. Kerangka Pemikiran .....	12
1.6. Sistematika Penulisan Hukum.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tindak Pidana .....	15
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana .....	15
2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	18
2.2. Kesusaha.....	20

2.2.1. Pengertian Kesusilaan .....	20
2.2.2. Bentuk-bentuk Kesusilaan.....	23
2.3. Prostitusi .....	25
2.3.1. Pengertian Prostitusi.....	25
2.3.2. Jenis-jenis Prostitusi .....	28
2.3.3. Pihak yang Terlibat Dalam Prostitusi .....	30
2.4. Peraturan Daerah .....	32
2.4.1. Pengertian Peraturan Daerah .....	32
2.4.2. Asas-asas Peraturan Daerah.....	34
2.4.3. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah.	36
2.4.4. Materi Muatan Peraturan Daerah .....	38
2.4.5. Fungsi Peraturan Daerah .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian .....	41
3.2. Pendekatan Penelitian .....	42
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	42
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	43
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	43
3.6. Lokasi Penelitian .....	44
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Alasan-alasan yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi di Wilayah Kota Tangerang .....	45
4.2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran Dalam Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi khususnya di Wilayah Kota Tangerang .	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1.Kesimpulan .....	75
5.2.Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	79

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Kita yang berusaha dan Allah SWT yang menentukan, maka dari itu teruslah berusaha dan teruslah berdoa, karena usaha tanpa doa adalah sombang dan doa tanpa usaha hanyalah omong kosong

Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, maka jangan pernah merasa berkecil hati disaat apa yang kita impikan belum tercapai, mungkin Allah SWT ingin melihat seberapa besar perjuangan kita, orang yang pandai adalah orang yang belajar dari kesalahannya di masa lalu, agar tidak mengulangi kembali kesalahannya dan orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah terjatuh, tetapi orang yang sesegera mungkin bangkit meskipun sering kali terjatuh

### **PERSEMBAHAN**

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada:

Dzat Yang Maha Besar ALLAH SWT,

Rasulullah Nabi Muhammad SAW,

Kedua Orang,

Keluarga Besar,

Almamater dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas

Bhayangkara Jakarta Raya